

## PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DI DAERAH

Iin Khairuunnisa  
STKIP PGRI Sukabumi

### *Abstract*

*Facing the free market era, local governments need to make structural policies that favor and provide incentives for the development and improvement of SMEs performance. The potential of women in community life still has not received a reasonable portion. This needs to be addressed wisely and wisely by the government considering the women from the side of quantity ranks first from the composition of citizens. The type of research used is descriptive research with qualitative method. The discussion in this article is the role of local governments to improve women's empowerment in the economic field by providing women with sewing skills training, micro credit business, and women leadership training. Where the skills training and micro credit business is given to the community where the economic level is still below standard or pre prosperous in order to improve the welfare of the family through the efforts provided by the local government.*

**Keywords:** women's economy, local government

### 1. PENDAHULUAN

Potensi kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat masih belum mendapat porsi yang wajar. Hal ini perlu disikapi secara arif dan bijaksana oleh pemerintah mengingat kaum perempuan dari sisi kuantitas menempati urutan pertama dari komposisi warga masyarakat. Dilaksanakannya prinsip otonomi yang luas dan tanggung jawab, maka kesempatan daerah kabupaten/kota terbuka luas untuk bisa mengembangkan berbagai yang ada. Hakekat otonomi daerah haruslah diorientasikan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu berbicara soal otonomi daerah tidak hanya semata-mata berbicara tentang pemenuhan anggaran, namun harus berbicara tentang berbagai hal yang diorientasikan untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itulah seharusnya yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan

rakyat. Dengan kata lain, jika pelaksanaan otonomi daerah belum membawa kesejahteraan rakyat maka otonomi daerah perlu dievaluasi lagi. Dalam hal ini peran pemerintah daerah sebagai mediator, inovator dan memberi *guidance* kepada masyarakat luas agar kelompok masyarakat bersedia berpartisipasi mendukung otonomi daerah. Dalam hal perekonomian, pemerintahan kota harus mampu memberikan stimulan pada masyarakat agar melakukan percepatan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Disamping itu pemerintah kota harus mampu menjadi mediasi kelompok masyarakat dengan kelompok pihak ketiga, termasuk kelompok investor, dalam rangka akses modal dan juga pasar dalam memasarkan produksi kelompok masyarakat. Karena selama ini, dua hal ini yang tidak dimiliki oleh kelompok usaha ekonomi menengah kebawah.

Menghadapi era pasar bebas, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan struktural yang memihak dan memberikan insentif bagi pengembangan dan peningkatan kinerja UKM. Kebijakan yang dimaksud diorientasikan pada; meningkatkan kualitas SDM, melindungi usaha kecil dan menengah dalam persaingan dan memperluas/ memperkuat partisipasi UKM, meningkatkan daya saing, mempermudah akses ke sumber modal, serta membantu semua jaringan pasar. Tanpa keberpihakan pada kelompok masyarakat bawah, sulit mengharapkan kesejahteraan rakyat daerah, terlebih masyarakat perkotaan yang sebagian besar penduduknya hidup dan berkecimpung di usaha kecil. Dengan demikian diharapkan mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan masyarakat perkotaan.

Kemiskinan dan pengangguran bukan merupakan kesalahan dan dosa si miskin. Mereka telah menjadi korban sistem ekonomi kapitalistik-liberal yang menempatkan pemilik modal atau kapitalis sebagai satu-satunya pihak yang menciptakan lapangan kerja atau pemberi pekerjaan, sedangkan kelompok miskin pengemis pekerjaan (Mubyarto,2004:15). Fenomena sekarang menunjukkan ada kecenderungan pemerintah kabupaten/kota yang banyak memberikan ruang kepada investor untuk bisa berinvestasi di daerahnya. Pemda selalu memuja-muja bahwa investor bisa membuka kesempatan kerja, mengurangi pengangguran dan meningkatkan PAD. Ada satu yang dilupakan pemda, bahwa pengusaha/investor juga mencari keuntungan. Karena prinsip investor selalu menambah produksi dan memaksimalkan keuntungan. Untuk itulah perlu ditata ulang menghadapi dampak dari kapitalisasi

perekonomian perkotaan, sebelum terpuruk lebih jauh.

Rendahnya tingkat pendidikan perempuan akan memberikan dampak pada kedudukannya dalam pekerjaan dan upah yang mereka terima. Dengan rendahnya pendidikan berarti kurangnya keterampilan dan keahlian, untuk itu pekerjaan yang cocok adalah sebagai buruh manual dan upah yang mereka terima lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang terampil dan ahli dibidang tertentu. secara hukum kesempatan untuk meningkatkan status dan peranan perempuan sejak Indonesia meratifikasi konvensi perempuan dengan UU Nomor 7 Tahun 1984. Keteringgalan kaum perempuan ini dapat dilihat dari pembagian kerja secara seksual didalam masyarakat, dimana peran perempuan adalah dilingkungan rumah tangga dan peran pria diluar rumah. Pembagian pekerja secara seksual ini jelas tidak adil bagi wanita sebab dapat menempatkan wanita pada kedudukan subordinate/terpinggirkan terhadap pria sehingga cita-cita untuk mewujudkan wanita sebagai mitra sejajar pria baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat sulit terlaksana. Untuk itu perlu adanya pemberdayaan perempuan sehingga tidak menempatkan wanita pada kedudukan yang termajinalkan. Untuk itu menghadapi lebih jauh tentang sikap, spirit dan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi kerakyatan.

## 2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, menurut Muhammad Nasir , metode deskriptif adalah suatu metode

dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu situasi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas penelitian pada masa sekarang (Muhammad Nasir:1992). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan-hubungan antar fenomena yang diteliti. Sedangkan maksud metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

### 3. PEMBAHASAN

Pemberdayaan sebagai upaya yang memperbisa dan memperluas kepuasan masyarakat untuk bisa berperan serta aktif dalam proses pembangunan. Pemberdayaan dimaksudkan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam kesatuan wilayah yang sebagian besar diakibatkan kesenjangan terhadap akses, modal, prasarana, informasi teknologi, pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Menurut Mahardika (2000;71-74) pemberdayaan sebagai langkah untuk membuka kemungkinan perubahan, pertama-tama melihat tatanan yang kini berjalan sebagai salah satu pusat masalah, yang bila tidak terjadi transformasi tatanan, maka berbagai masalah yang ada tidak akan pernah diselesaikan dengan tuntas.

Pemberdayaan menurut Dadang Juliantara dkk adalah:

“ Pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural baik didalam kehidupan keluarga, masyarakat, Negara, regional, internasional maupun dalam bidang

politik, ekonomi, dll”(Dadang Juliantara,dkk :2003).

Konsep pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk menjadikan sesuatu yang adil dan beradab menjadi lebih efektif dalam seluruh aspek kehidupan seperti dalam paragraf sebelumnya tertuliskan tentang permasalahan yang dihadapi kaum perempuan sehingga perlu adanya pemberdayaan.

Berdasarkan definisi diatas maka pemberdayaan perempuan sangat perlu agar perempuan memperoleh akses dan peluang di bidang ekonomi, politik, sosial budaya serta mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.

Pemberdayaan adalah pembangunan yang dibuat secara demokratis, disentralistik dan partisipator. (Satoro Eko: 2003) dalam hal ini masyarakat menempati posisi utama, pada masa lalu dalam paradigma lama devolepmentalisme, pembangunan didominasi oleh negara dan modal. Sementara dalam paradigma baru pemberdayaan lebih mengedepankan masyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara partisipatif. Masyarakat menempati posisi utama yang memulai, mengelola dan menikmati kondisi yang kondusif bagi munculnya prakarsa masyarakat lokal.

Pemberdayaan yang didasarkan pada prinsip pemilihan pada kelompok masyarakat yang marginal. Yakni mereka yang berada di bawah lapisan struktur sosial atau para korban kesewenang-wenangan, agar mempunyai posisi da kekuatan tawar-menawar, sehingga mampu memecahkan masalah dan mengubah posisinya. Jadi pemberdayaan tidak semata-mata untuk meningkatkan kualitas ekonomi jangka pendek, melainkan juga secara strategis

mengarah pada transformasi tatanan. Yakni struktur tatanan yang kurang berpihak pada warga masyarakat menuju tatanan yang mempunyai keberpihakan pada masyarakat marginal.

Dalam konteks penelitian ini konsep pemberdayaan dikaitkan peran perempuan dalam meningkatkan usaha memperkuat ekonomi kerakyatan masyarakat perkotaan. Karena secara riil peran perempuan di masyarakat perkotaan dalam menciptakan sektor informal yang cukup besar. Untuk itu jika pemerintah ingin menghidupkan ekonomi kerakyatan perkotaan, maka pemerintah harus mempunyai kepedulian untuk memberdayakan perempuan, sehingga tercipta kondisi yang kondusif bagi muncul dan berkembangnya ekonomi kerakyatan.

Selama ini perempuan hanya sebagai objek dan pihak penerima dari proses pembangunan. Padahal mungkin juga dapat melihat potensi perempuan yang bisa dimainkan sebagai pelaku perubahan dan pembangunan. Untuk itulah perlunya menyusun tatanan masyarakat yang lebih memberdayakan perempuan, dimana hak-hak asasi perempuan dilindungi dan kesetaraan gender menjadi norma yang diterapkan dalam kerangka sosial dan kelembagaan. Seperti yang sedang diperjuangkan oleh kelompok LSM dan lembaga-lembaga dunia yang peduli terhadap perempuan.

Pentingnya perempuan dalam sebuah negara adalah untuk dapat mengakses pendidikan, kerja, alat-alat dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pembangunan daerah. Dengan demikian akan menentukan berbagai strategi program dan kegiatan pembangunan yang perlu dilaksanakan oleh negara. Bagi elit atau pejabat pembuat kebijakan, dnegan

pengetahuan tentang gender dakan diperoleh seperangkat pengetahuan tentang kesehatan, usia harapan hidup, tingkat usia produktif dan kecenderungan pertumbuhan penduduk dan lain sebagainya. Oleh karena itu keputusan yang diambil cukup akurat dan mendasar berkaitan dengan kondisi riil masyarakat.

Permasalahan peran perempuan menurut Mansur fakih (Julia:2003) dibedakan menjadi dua. Pertama, permasalahan perempuan disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya kaum perempuan itu sendiri. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan perempuan bersaing dengan kaum laki-laki dalam hal pembangunan. Oleh karena itu strategi yang dibutuhkan adalah langkah untuk menghilangkan diskriminasi yang menghalangi usaha mendidik kaum perempuan. Kedua, pendekatan efisiensi yakni pemikiran bahwa pembangunan mengalami kegagalan karena perempuan tidak dilibatkan dalam proses pembangunan. Analisis ini lebih memusatkan perhatian pada peran perempuan yang sangat marginal, dan lebih diorientasikan pada peran praktis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Ravridson bashir (Baswir:2005) . Perekonomian kerakyatan mengandung tiga unsur yaitu: pertama, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan nasional. Kedua, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produk nasional. Ketiga, kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produk nasional itu harus berlangsung dibawah pimpinan atau anggota masyarakat. Dengan demikian partisipasi anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional menempati kedudukan penting dalam ekonomi masyarakat.

Disamping itu dalam rangka ekonomi kerakyatan, maka pemerintah harus berani menjamin agar setiap warganya bisa menikmati produksi nasional, termasuk di dalamnya fakir miskin dan anak terlantar. Dalam konteks daerah, maka pemerintah daerah harus mampu menjamin bahwa warga daerah mampu mengakses berbagai kebijakan ekonomi daerah. Dengan demikian ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi, maka anggota masyarakat tidak hanya menjadi objek perekonomian. Setiap anggota masyarakat harus diupayakan oleh pemerintah supaya menjadi subjek perekonomian. Dalam hal ini bukan berarti menolak adanya kebijakan mendatangkan investor dalam pembangunan di pemerintahan kota, tetapi penyelenggaraan kegiatan itu harus tetap berada di bawah pengawasan atau pengendalian masyarakat. Untuk itulah perlunya partisipasi seluruh warga masyarakat dalam kepemilikan modal atau faktor-faktor produksi dalam proses pembangunan perekonomian. Hal ini akan terwujud bila ada kebijakan dari pemerintah kota untuk mengakses perekonomian warga kota, terutama ekonomi menengah ke bawah yang jumlahnya cukup besar.

Dalam hal ini maka peranan pemerintah daerah meningkatkan perekonomian dan ketenagakerjaan wanita adalah mengembangkan ketenagakerjaan secara mandiri dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan upah pekerja, menjamin kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat, serta melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang merupakan dampak krisis ekonomi.

Apabila upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peranan dan diiringi dengan pola perencanaan yang baik maka menghasilkan sesuatu yang baik pula. Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar, untuk itu diperlukan peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian masyarakat, melalui aktivitas pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Untuk melaksanakan fungsi pemberdayaan dengan baik, menurut Mailing melalui tiga cara yaitu:

1. Menciptakan suatu iklim yang memungkinkan potensi kaum perempuan berkembang.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh kaum perempuan.
3. Memberdayakan mengandung arti pula melindungi. (Mailing: 1996).

Dengan demikian, maka peranan pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan adalah membangkitkan motivasi/meningkatkan motivasi masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan perempuan agar dapat menimbulkan pengaruh positif atas produktivitas masyarakat, untuk mencapai kemandirian dan meningkatnya pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan.

Peranan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan berdasarkan fungsi hakiki pemerintah menurut Ryaas Rasyid adalah pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum

perempuan yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap budaya, kemiskinan, dan keterbelakangan. Ada tiga cara untuk meningkatkan pemberdayaan yang baik menurut Kartasasmita adalah:

1. Upaya memberdayakan perempuan harus pertama-tama dimulai dengan menciptakan suatu iklim yang memungkinkan potensi kaum perempuan berkembang. Upaya ini bertitik tolak pada pengenalan bahwa setiap manusia laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaannya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh kaum perempuan. Upaya ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Dalam hal ini kaum perempuan harus diberi kesempatan dengan membuka akses pada modal, teknologi, informasi, pasar, dan berbagai peluang lainnya.
3. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus diupayakan agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah karena kurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan ini. Memberdayakan perempuan adalah memampukan dan memandirikan kaum perempuan sebagai warga masyarakat yang sejajar dengan kaum laki-laki.

Pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi dan ketenagakerjaan perempuan adalah mengembangkan ketenagakerjaan secara mandiri dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kopotensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan upah kerja, menjamin kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat, serta melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang merupakan dampak krisis ekonomi.

### **Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi**

Peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dengan melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan perempuan dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang merupakan dampak krisis ekonomi. Untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, maka peran pemerintah daerah dapat dilihat melalui fungsi dasar pemerintah yaitu pemberdayaan.

### **Penciptakan Iklim Yang Kondusif Bagi Pengembangan Potensi Kaum Perempuan di Bidang Ekonomi.**

Peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi kaum perempuan dibidang ekonomi melalui program program kerja yang sudah terealisasi selama berdirinya bagian pemberdayaan perempuan diantaranya meliputi:

1. Memberikan pelatihan keterampilan manajemen kewirausahaan perempuan meliputi:
  - a. Pelatihan keterampilan perempuan dilaksanakan dalam kegiatan pelatihan menjahit.

Maksud dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan perempuan dibidang menjahit pakaian serta tujuannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan usaha potensinya bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Program ini juga memberikan wawasan serta keterampilan bagi perempuan sebagai upaya Pemerintah Kota untuk memberdayakan perempuan dalam pembangunan. Pelatihan keterampilan ini dilaksanakan dikelurahan binaan. Latihan ini diberikan kepada sumber daya manusia yang berpendidikan relatif rendah dan ditangani dengan sungguh-sungguh karena mempunyai daya dukung yang sangat kuat bagi perekonomian rakyat. Usaha konveksi/menjahit pakaian merupakan salah satu jawaban positif bagi pergerakan ekonomi rakyat yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi Kota.

Potensi kaum wanita di bidang ekonomi ini dapat dikembangkan melalui program kerja yang sudah ada dan mendapat masukan dari pihak lain yang bekerja sama dalam menangani pemberdayaan perempuan seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi wanita dan lain-lain yang lebih menjangkau kepada sasaran masyarakat bawah. Hal ini merupakan masukan positif bagi kemajuan dan pengembangan perekonomian perempuan. Dengan melihat minimnya tingkat pendidikan kaum perempuan akibat krisis ekonomi, budaya, serta tempat pendidikan jauh dari rumah maka peran dari lembaga non pemerintah yang selama ini bekerja sama dengan pemerintah seperti P2TP2 dapat memberikan kegiatan latihan yang

berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan kaum perempuan.

Minimnya tingkat pendidikan maka peluang kaum perempuan untuk bekerja diruang publik sangat minim pula, jika dapat dilihat dari kegiatan perempuan lebih besar sebagai ibu rumah tangga jika dibandingkan dengan perempuan yang bekerja diluar rumah. Dengan sebagian kegiatan perempuan bekerja sebagai ibu rumah tangga maka lebih cocok kaum perempuan bermata pencaharian sebagai wirausaha dengan cara meningkatkan perekonomian keluarga. Agar kaum perempuan mempunyai potensi yang dapat diandalkan dalam keluarga dimana dapat membantu perekonomian keluarga maka peranan pemerintah daerah dalam meningkatkannya melalui berbagai upaya melalui program-program yang sudah disediakan dan dapat diarahkan demi kemajuan bersama.

Motivasi yang diberikan pemerintah daerah kepada kaum perempuan dalam hal manajemen pengelolaan usaha, pengembangan desain, maupun pengembangan kualitas produksinya dan bantuan permodalan agar mampu berkembang dan bersaing dengan usaha-usaha lain yang sudah maju. Materi-materi yang diberikan dalam pelatihan keterampilan menjahit dalam bentuk materi serta latihan praktek menjahit. Materi-materi tersebut sebagai berikut: pola dasar badan (depan dan belakang), pola dasar tangan, pola dasar tangan (depan dan belakang), cetak kupnat, macam-macam leher, macam-macam kerah, macam-macam kerah setali, macam-macam rok, kulot, macam-macam tangan, rompi, cara memperpanjang blus, kebaya kartini, celana panjang, set dres, hem/kemeja, cara mengukur, cara membuat pola dasar ukur sendiri,

memperpanjang pola diatas kertas, praktek memotong dan praktek menjahit.

Pelatihan ini diberikan kepada masyarakat pra sejahtera dikelurahan binaan. Warga yang diberikan pelatihan tersebut dapat dilihat dari kebutuhannya oleh petugas kelurahan yang telah didata. Pelatihan ini dilaksanakan rutin tahunan di tiap daerah binaan yang berbedah-bedah serta dilanjutkan dengan tahap pembordiran. Hal ini untuk meningkatkan kreativitas dan daya jual dari produksi.

#### b. Usaha mikro kredit

Usaha ini diberikan kepada seluruh masyarakat yang mau menjalankan usaha kecil-kecilan, dengan cara diberikan kredit dengan bunga yang sangat rendah tanpa adanya anjungan seperti rumah tanah dan lain sebagainya karena sasaran dari usaha ini adalah masyarakat ekonomi lemah atau pra sejahtera. Untuk memastikan dana yang dipinjam tersebut mencapai sasaran maka ada tim yang mensurvei keadaan dari peminjam atau sipenerima kredit yang sebenarnya sehingga dana tersebut dapat dikucurkan untuk melaksanakan usaha kecil tersebut.

Upaya dari usaha mikro kredit ini adalah untuk meningkatkan perekonomian keluarga pra sejahtera dan meningkatkan perekonomian Kota serta mengurangi angka kemiskinan. Dana yang di gunakan untuk membantu usaha kecil melalui usaha mikro kredit merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian rakyat melalui usaha kredit mikro ini diberikan kepada masyarakat yang menjalankan usaha kecil seperti pedagang warung nasi, pedagang gorengan, dan pedagang kecil lainnya. Pedagang-pedagang ini lebih diprioritaskan oleh pemerintah daerah

dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya dan mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kota. Dengan upaya ini maka peranan pemerintah daerah semakin hari semakin berat dalam meningkatkan angka partisipasi angkatan kerja perempuan dan pendidikan kaum perempuan dalam berbagai bidang.

#### 2. Pelatihan kepemimpinan

Untuk mewujudkan peningkatan pengetahuan kepemimpinan perempuan maka diberikan pelatihan manajemen dan kepemimpinan perempuan dalam pembangunan dengan menggunakan modul dari kantor menteri Negara pemberdayaan perempuan Republik Indonesia yaitu:

- a. Potensi dan peranan perempuan dalam pembangunan
- b. Manajemen dan kepemimpinan perempuan
- c. Menggerakkan masyarakat
- d. Perempuan sebagai manager program

Pelatihan kepemimpinan perempuan diberikan kepada kader gender, pemimpin/calon pemimpin diorganisasi, sebagai salah satu upaya meningkatkan kiprah perempuan dalam berbagai peranan dan posisi strategis yang relatif masih rendah dibandingkan pria supaya mampu dipersiapkan sebagai Pembina, penggerak, pelaku pembangunan serta pemanfaat hasil pembangunan baik dalam keluarga, masyarakat sebagai mitra seajar pria.

Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi dilaksanakan melalui upaya penumbuhan minat dan motivasi dibidang usaha dan tenaga terampil melalui proses pembelajaran yang terarah dan berkelanjutan. Keseluruhan upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan kelompok dengan memberdayakan institusi masyarakat. Adapun upaya yang mengarah



kepada peningkatan kualitas perempuan dan keluarganya sehingga keluarganya tersebut menjadi wirausaha dan tenaga terampil yang profesional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan kualitas peran perempuan dan kemandiriannya dibidang ekonomi dan peningkatan taraf kehidupan keluarga.

Setiap perempuan terutama perempuan yang masih tertinggal sesuai dengan potensi dan peluang yang ada, akan dibantu untuk mengembangkan dirinya. Upaya tersebut dilakukan dengan menumbuhkan semangat dan motivasi berusaha serta meningkatkan keterampilan terutama bagi para ibu/perempuan dari pasangan usia subur dan keluarga pra sejahtera.

### **Penguatan Potensi Perempuan untuk Berwirausaha**

Ini merupakan peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui upaya langkah-langkah positif, selain hanya menciptakan iklim dan suasana. Dalam hal ini kaum perempuan harus diberi kesempatan dengan membuka akses pada modal teknologi, informasi, pasar dan berbagai peluang lainnya.

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui pengembangan produktifitas sumber daya manusia, maka bagi perempuan yang tidak memiliki minat usaha diarahkan pada peningkatan keterampilan sesuai dengan minat, bakat dan potensi diri. Peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi melalui upaya-upaya yang perlu dilaksanakan dalam pengembangan keterampilan tersebut meliputi:

1) Peningkatan jaringan keterampilan

Peningkatan jaringan keterampilan adalah melakukan akses kepada lembaga/pusat kegiatan keterampilan agar dapat memberikan bantuan keterampilan yang dibutuhkan oleh kaum perempuan sesuai dengan bakat, minat dan potensi serta sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan tenaga terampil yang dapat memenuhi kebutuhan kerja bahkan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menampung tenaga kerja lain.

Langkah-langkah peningkatan:

a. Identifikasi potensi wilayah dan pusat keterampilan

Upaya ini untuk mendata minat, bakat yang dimiliki kaum perempuan agar dapat disalurkan ke pusat keterampilan sesuai dengan minat, bakat serta keahliannya. Hal ini merupakan langkah awal dalam upaya pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi-potensi kaum perempuan yang mereka miliki.

b. Identifikasi bidang keterampilan yang dibutuhkan oleh kaum perempuan menyangkut bidang ekonomi industri kecil, perdagangan dan jasa.

Upaya yang dilakukan oleh kaum perempuan dibidang keterampilan yang berkaitan dengan ekonomi industri kecil seperti usaha kerajinan tangan yang akan dijadikan sebagai industri rumah tangga untuk membantu perekonomian perempuan, sedangkan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan oleh kaum perempuan adalah keterampilan dalam berdagang dimana memberikan peluang kepada kaum perempuan untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam meningkatkan perdagangan dan jasa yang diberikan.

c. Membantu menghubungkan pusat-pusat keterampilan sesuai dengan

bidang yang diminati oleh kaum perempuan.

Latihan keterampilan dapat menghasilkan suatu yang maksimal maka bidang yang diminati oleh kaum perempuan dapat di hubungkan sesuai dengan pusat-pusat keterampilan sama dengan minatnya.

d. Memfasilitasi dana dan sarana pelatihan

Agar pelatihan keterampilan bisa berjalan sesuai dengan rencana seperti meningkatkan potensi ekonomi keluarga maka pemerintah dapat memfasilitasi dengan memberikan bantuan kredit dengan bunga yang sangat rendah untuk melanjutkan usaha kecil-kecilan serta sarana pelatihan keterampilan bagi mereka yang belum melaksanakan latihan tersebut

e. Pembinaan kemitraan pemanfaatan tenaga terampil

Pembinaan keterampilan pemanfaatan tenaga terampil merupakan upaya menggalang kerjasama dengan pihak instansi terkait baik pemerintah, swasta, LSM, maupun masyarakat dalam mendayagunakan kaum perempuan yang telah memiliki keterampilan dibidang tertentu.

Tujuannya adalah untuk memanfaatkan tenaga terampil yang dilatih sehingga memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang keterampilan yang dimilikinya dengan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

Langkah-langkahnya :

a. Identifikasi kebutuhan kemitraan

Upaya mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bekerja sama agar manfaat tenaga terampil yang dilatih memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang yang dimilikinya dengan prinsip saling membutuhkan dan menguntungkan.

b. Identifikasi potensi mitra usaha

Mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh mitra usaha agar dapat saling menguntungkan dalam hubungan kemitraan.

c. Pendekatan kepada mitra usaha

Menjalin kerja sama dengan mitra usaha dengan berbagai instansi pemerintah atau non pemerintah dalam segala bidang melalui pendekatan-pendekatan kemitraan.

d. Menghubungkan mitra usaha dengan anggota kelompok tenaga terampil

2) Pembinaan Modal Untuk Keterampilan

Pembinaan ini merupakan pembiayaan yang diperlukan untuk proses pembelajaran pelatihan dalam peningkatan keterampilan sumber daya manusia khususnya kaum wanita. Tujuannya membantu kaum wanita yang berminat meningkatkan keterampilan tetapi tidak memiliki dana untuk membiayai kegiatan pendidikan dan keterampilan tersebut.

Langkah-langkah :

a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis usaha

b. Fasilitasi modal dan sarana

Pemerintah memberikan fasilitas modal dan sarana untuk menunjang peningkatan keterampilan dalam hal meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

c. Pembinaan produksi

Memberikan pelatihan produksi kepada kaum perempuan untuk lebih produktif dalam meningkatkan keterampilannya.

d. Pembinaan kemitraan

Memberikan pelatihan dan pembinaan hubungan kerjasama agar hubungan antara pemberi dana dan yang menerimanya dapat bermitra dengan baik.

e. Pembinaan pemasaran

f. Pembinaan jalinan usaha

Potensi yang dimiliki oleh kaum perempuan ini bisa berkembang sesuai dengan rencana maka pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak luar seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Wanita, P2TP2 dan lainnya yang sering menangani pemberdayaan perempuan karena pemerintah daerah hanya sebagai penentu kebijakan dimana LSM dan organisasi wanita tersebut yang menangani secara langsung permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Hal ini dapat dilihat bahwa bagian pemberdayaan perempuan Kota sebagai pemerintah daerah dalam menangani pemberdayaan perempuan mempunyai kepanjangan tangan melalui suatu organisasi perempuan yang disebut sebagai pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan. Dimana P2TP2 ini sebagai pusat pelayanan bagi perempuan yang menghadapi berbagai masalah yang ditangani oleh divisi-divisi yang ada di P2TP2.

#### Daftar Pustaka

- Baswir, Refridsound. 2004. *Ekonomi Kerakyatan*. PUSTED UGM: Yogyakarta
- Dadang Juliantara, dkk. 2003. *Politik Pemberdayaan: Jalan Mewujudkan Otonomi desa*. Laper: Yogyakarta
- Julia Cleves Mosse. 2003. *Gender dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Mahardika, Timur. 2002. *Gerakan Massa : Mmengupayakan demokrasi dan keadilan secara damai*, Lampera Indonesia: Yogyakarta
- Mailing Oey, dkk. 1996, *Perempuan Indonesia Pemimpin masa depan*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

#### 4. KESIMPULAN

peranan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dengan cara memberikan pelatihan keterampilan menjahit kepada kaum perempuan, usaha mikro kredit, dan latihan kepemimpinan perempuan. Dimana latihan keterampilan dan usaha mikro kredit ini diberikan kepada masyarakat dimana tingkat ekonominya masih dibawah standar atau pra sejahtera agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui usaha-usaha yang di berikan oleh pemerintah daerah. Peranan ini mengarah kepada sasaran pemerintah daerah yaitu golongan menengah kebawah, sehingga langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan mencapai pada tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakatnya serta mengurangi angka kemiskinan.

- Mubyarto, 2004. *Teori Ekonomi dan kemiskinan*. Aditya Media: Yogyakarta
- Supardal, 2015. *Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi Kerakyatan Kota Yogyakarta*. Artikel untuk Jurnal Penelitian BAPEDA Kota Yogyakarta
- Sutoro Eko. 2003. *Reformasi politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. APMD Press: Yogyakarta